

---

---

## DAFTAR ISI

### Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

1. Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan  
Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia  
*Nanang Indra Kurniawan* 1-15
2. Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur  
*Tenti Kurniawati* 16-25
3. Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara:  
Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)  
*Hafid Rahardjo* 26-44
4. Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia:  
Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998  
*Ahmad Rizky Mardhatillah Umar* 45-61
5. Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi  
di Kabupaten Kulon Progo  
*Eka Zuni Lusi Astuti* 62-74
6. Pembangunan Berbasis *Waterfront* dan Transformasi Konflik di  
Bantaran Sungai: *Sebuah Pemikiran Awal*  
*Cahyo Seftyono* 75-83
7. Does the Pressure of Population and Poverty cause Deforestation?  
*Pungky Widiaryanto* 84-93

## Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia

**Nanang Indra Kurniawan**

Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Yogyakarta  
e-mail: nanang.kurniawan@gmail.com

### Abstract

Environmental issues have been largely discussed in development discourse since early 1970s, which have led to the idea of Sustainable Development. Despite of its importance, the debate on environment has been occupied by a tendency to put 'nature' and 'human' as well as 'crisis of nature' and 'crisis of justice' in static dichotomies. This article challenges this idea by arguing that the most central matter in environment and development discourses does not lie on 'human' and 'nature' per se but on the relationship between the two. The challenge of sustainable development is to continuously redefine relationships between human and nature. Using analytical frameworks of Dryzek (1997) and Nygren (1998) this article emphasizes the articulation of discourse repertoires by drawing on a case study among Indonesian environmental Non-Governmental Organizations (NGOs). This study finds out that Indonesian environmental NGOs often incorporate elements of various discourses. This phenomenon shows that environmental NGOs actively involve in the process of negotiation to redefine new borders of sustainable development in Indonesia.

### Key Words:

discourses; environment; sustainable development; non-governmental organizations.

### Abstraksi

Isu lingkungan hidup telah banyak dibahas dalam wacana pembangunan sejak awal tahun 1970an, yang akhirnya membawa pada gagasan Pembangunan Berkelanjutan. Diluar substansinya, perdebatan mengenai lingkungan hidup cenderung menempatkan 'alam' dan 'manusia', dan juga 'krisis alam' serta 'krisis keadilan' dalam dikotomi yang statis.

Artikel ini menyanggah gagasan tersebut dengan argumen bahwa hal yang paling sentral dalam wacana lingkungan hidup dan pembangunan bukan semata-mata terletak pada 'manusia' dan 'alam', namun pada hubungan antara keduanya. Tantangan bagi pembangunan berkelanjutan adalah untuk secara terus-menerus mendefinisikan kembali relasi antara manusia dengan alam. Dengan menggunakan kerangka analitik Dryzek (1997) dan Nygren (1998), artikel ini menekankan pada artikulasi repertoar wacana dengan mengambil sebuah studi kasus antara LSM lingkungan Indonesia. Studi ini menemukan bahwa LSM lingkungan hidup di Indonesia sering memasukkan berbagai unsur dari berbagai wacana. Fenomena ini menunjukkan bahwa LSM lingkungan hidup terlibat secara aktif dalam proses negosiasi untuk mendefinisikan kembali batasan-batasan baru dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

### **Kata Kunci:**

wacana; lingkungan; pembangunan berkelanjutan; lembaga swadaya masyarakat.

### **Latar Belakang**

Isu lingkungan telah menjadi pilar penting dalam wacana pembangunan sejak awal 1970-an. Bahkan semenjak akhir 1980-an soal ini telah menjadi arus utama berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat global maupun nasional. Salah satu momen penting yang meletakkan lingkungan sebagai tujuan sekaligus kerangka kerja pembangunan bisa ditemukan dalam laporan World Commission for Environment and Development, atau lebih dikenal sebagai Komisi Brundtland, yang ditugasi Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1987. Dalam laporan yang berjudul *Our Common Future* komisi tersebut menggagas konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang diarahkan sebagai agenda politik global dengan menempatkan 'pembangunan' dan 'lingkungan' dalam satu kesatuan utuh. Menurut komisi ini pembangunan harus mampu mendorong keberlanjutan ekologis dan keadilan global. Dalam laporan ini pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya" (*World Commission for Environment and Development, 1987*). Gagasan ini kembali ditegaskan dalam *United Nation Conference of Environment and Development (UNCED)* yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Meski telah menjadi acuan penting strategi pembangunan global, namun integrasi 'pembangunan' dan 'lingkungan' tetap menyisakan persoalan. Pembangunan berkelanjutan dianggap hanya menjadi jargon yang mudah diucapkan tapi sulit diimplementasikan. Beberapa pertanyaan operasional yang diajukan adalah: apa yang

akan dilanjutkan? Berlanjut untuk siapa? Berlanjut oleh siapa? (Nygren, 1998a). Pertanyaan-pertanyaan inilah yang lantas memunculkan aneka wacana yang mengilhami berbagai aktor untuk mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks inilah membahas organisasi masyarakat sipil terutama lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki relevansi kuat karena melalui organisasi-organisasi inilah pembangunan berkelanjutan diperdebatkan dan dioperasionalkan lewat program-program kerjanya. Hubungan LSM dengan lembaga pembangunan global terutama donor dan organisasi masyarakat sipil trans nasional telah memungkinkan mereka menjadi agen produksi dan reproduksi wacana lingkungan dan pembangunan. Ini terjadi karena lembaga-lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil internasional dengan kekuatan finansialnya mampu mendefinisikan prioritas isu-isu lingkungan yang dirumuskan dalam agenda kerja LSM di negara Dunia Ketiga.

Selama ini telah banyak studi yang memfokuskan pada dimensi ekonomi politik organisasi-organisasi pembangunan di level lokal, nasional dan global. Namun upaya melihat bagaimana organisasi tersebut bekerja sebagai sistem pengetahuan yang memproduksi dan mereproduksi wacana belum banyak dilihat (Nygren, 1998b, 2000). Artikel ini mencoba mendeskripsikan dan memetakan ragam diskursus lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang berkembang dalam lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Lewat wacana-wacana inilah intervensi lingkungan di Indonesia mendapatkan legitimasi dan pembenaran sosial. Dengan mengambil kasus peran LSM dalam masalah-masalah

kehutanan di Indonesia artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan wacana lingkungan dan pembangunan telah berkontribusi mendorong pendefinisian ulang secara kontinyu batas-batas baru hubungan alam dan manusia.

### **Mendefinisikan Lingkungan Dunia Ketiga Lewat Wacana**

Mengapa wacana berperan dalam membentuk praktek lingkungan dan pembangunan? Bagaimana wacana tersebut bekerja? Mengapa Dunia Ketiga dijadikan sebagai target kunci wacana lingkungan dan pembangunan? Pertanyaan-pertanyaan ini telah lama menggelitik para ilmuwan ekologi politik dalam empat dekade terakhir.

Urgensi membahas wacana lingkungan dan pembangunan sebenarnya berangkat dari fakta penguatan retorika 'krisis' dalam perbincangan publik. Ini bisa dilihat dari media, kurikulum pendidikan, jargon politik yang mereproduksi ancaman bahwa pembangunan telah menghasilkan krisis ekologis. Hutan makin rusak, laut dan sungai tercemar, iklim makin panas, ozone berlubang, air sulit didapat, udara kotor, dll.

Studi-studi pos strukturalis yang dilakukan Dryzek (1997), Nygren (1998a, 1999), Castre dan Braun (2001), Hajer (1995) menunjukkan bahwa penggunaan konstruksi sosial tentang 'masalah' dan 'krisis' telah memberi pengaruh besar terhadap pilihan kebijakan lingkungan dan pembangunan. Konsep tentang alam, lingkungan, manusia beserta hubungan-hubungannya—yang mendasari pilihan kebijakan— tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang alamiah tapi selalu dibentuk melalui gagasan, narasi dan perbincangan (Bryant, 1998; Castree&Braun, 2001). Studi-studi tersebut juga menelaah bahwa konstruksi sosial atas lingkungan telah memfasilitasi kekuatan-kekuatan dominan untuk mengontrol manusia dan lingkungan (lihat Bryant, 1998).

Disinilah menjadi penting membahas peran gagasan dan perbincangan tentang lingkungan. Menurut Schmink dan Wood (Schmink dan Wood, 1992 dalam Bryant 1998): "... *ideas are never innocent but 'either reinforce or challenge existing social and economic arrangements'.*" Dalam bahasa Blaikie and Brookfield (1987) masalah lingkungan terjadi karena ia dilihat sebagai masalah. Perubahan lingkungan menjadi masalah karena ia dianggap mengganggu kepentingan kelompok-kelompok sosial tertentu. Studi yang dilakukan Escobar (1995), Goldman (2005), Luke (1999) tentang pembangunan berkelanjutan juga memberi penegasan posisi ini. Menurut mereka pendefinisian 'krisis ekologi' tidak sekedar mempengaruhi praktek-praktek lingkungan dan pembangunan. Pendefinisian tersebut juga telah dimanfaatkan sebagai mekanisme pendisiplinan praktek-praktek lingkungan.

Perkembangan kajian pos strukturalis kontemporer tentang 'lingkungan yang dibentuk' sangat dipengaruhi pemikiran Michel Foucault tentang ekologi. Bagi Foucault, ekologi merupakan konsep yang muncul dari penemuan teknik kekuasaan abad 18 ketika "populasi" mulai diwacanakan sebagai masalah ekonomi dan politik (Foucault, 1980). Hal ini diperkuat dengan berkembangnya demografi sebagai ilmu pengadministrasian negara. Melalui angka, data statistik dijadikan bahan pengawasan (*numerical surveillance*) yang memastikan kontrol negara atas alam, bumi dan isinya, serta manusia. Berapa jumlah petani, penduduk negara, banjir yang terjadi dalam setahun, produksi pangan, pangan yang dikonsumsi, penyakit tanaman muncul, pangan yang perlu diekspor dan diimpor, dll.

Populasi yang tidak terkontrol dianggap akan membawa persoalan lingkungan. Sebaliknya, lingkungan yang terdegradasi juga mengancam kelangsungan populasi.

Populasi dan lingkungan pada akhirnya menjadi dua kata yang ditempatkan negara sebagai objek kontrol politik dan dijadikan argumen 'normalisasi' perilaku individu. Proses ini makin relevan dengan menguatnya pengaruh teori Malthus tentang populasi dan pangan dalam berbagai kebijakan yang menegaskan keyakinan "*environmental limits*": lingkungan memiliki kemampuan terbatas untuk memenuhi kebutuhan pangan populasi manusia. 'Lingkungan' tidak lagi sekedar dikaitkan dengan moralitas (baik dan buruk) namun juga mulai dikaitkan dengan rasionalitas: lingkungan harus dikontrol oleh negara (Luke, 2005).

Review literatur yang dilakukan Mebratu (1998) tentang diskursus pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan' mewarisi tradisi 'rasionalisasi lingkungan' serta mereproduksi perspektif Malthusian tentang populasi, pangan dan ekologi. Ini misalnya bisa dilihat dari rumusan beberapa pemikir untuk memastikan keberlanjutan populasi dan ekologi lewat proyek global: populasi dunia harus 'distabilkan', pengembangan teknologi yang tepat, audit lingkungan, mendorong kerangka regulasi baru tentang lingkungan dan populasi, melakukan pendidikan ulang tentang pembangunan global (lihat Luke, 2005). Dalam proyek ini Dunia Ketiga menjadi target utama karena otoritas wacana dominan global menganggap sumber persoalan berada di sana.

Seperti yang ditunjukkan Luke (2005), menurut diskursus dominan pembangunan global problema lingkungan di Dunia Ketiga berakar dari dua hal. Pertama, rendahnya produktivitas ekonomi dalam pengelolaan lingkungan karena modal kecil; dan kedua, kurangnya keahlian mengelola lingkungan dan ekonomi. Dalam diskursus dominan ini pemerintah nasional tidak punya teknologi ataupun kemampuan manajerial mengelola populasi dan lingkungan. Ketika populasi

membengkak maka aktivitas produksi yang merusak lingkungan menjadi tak terkendali. Misal, hutan ditebang dan dibuka untuk lahan pertanian dan perumahan; limbah industri di buang tanpa pengolahan yang layak, dll. Masyarakat lokal yang selama sekian lama bergantung pada alam untuk kelangsungan ekonominya juga ikut-ikutan melakukan aktivitas merusak lingkungan; proses yang disebut Blaikie dan Brookfield (1987) dan Walker (2005) sebagai '*desperate ecocide*'. Ini terjadi karena a pengelolaan sumber daya alam negara meminggirkan kue sumberdaya alam dari masyarakat.

Meskipun pembangunan berkelanjutan mendapatkan posisi politik kuat di tingkat global namun wacana kritis juga bermunculan. Wacana kritis ini menggugat pembangunan berkelanjutan yang cenderung mendefinisikan Dunia Ketiga sebagai persoalan dan Dunia Pertama sebagai solusi. Menurut wacana ini, problema lingkungan di Dunia Ketiga sebenarnya berakar dari praktek-praktek ekspansi industrialisme Dunia Pertama. Pembangunan berkelanjutan dilihat hanya sebagai cara baru untuk menjamin keberlangsungan industrialisme Dunia Pertama karena krisis ekologis Dunia Ketiga bisa berimplikasi pada keberlanjutan ekonomi Dunia Pertama. Retorika pembangunan berkelanjutan tentang "kebutuhan hari ini" dan "kebutuhan generasi mendatang" makin dipertanyakan: kebutuhan apa? Kebutuhan siapa?

Studi Goldman (2005) dan Roberts (2011) memaparkan bahwa praktek pembangunan berkelanjutan, yang ide dasarnya diarahkan pada terciptanya kesejahteraan global, ternyata telah menghasilkan dominasi baru antara negara-negara Utara dan Selatan serta dominasi kekuatan ekonomi besar. Studi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dan 'krisis ekologis' dianggap sebagai wahana ekspansi kapitalisme global.

Teknologi negara maju diperkenalkan, hutang luar negeri untuk pengelolaan lingkungan ditingkatkan, privatisasi sumberdaya alam didorong, bimbingan teknis dan modernisasi pengelolaan sumber daya alam diperkuat. Pembangunan berkelanjutan dilihat sebagai cara ekonomi besar memastikan keberlangsungan suplai sumberdaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kapitalis. Inilah fase yang disebut sebagai *green capitalism* (Mueller&Passadakis, 2009).

Dari sinilah muncul pandangan tentang pembangunan berkelanjutan yang ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial. Menurut pendekatan ini isu penting yang harus diperhatikan bukan sekedar bagaimana masyarakat dunia mengatasi '*crisis of nature*' tapi juga '*crisis of justice*'. *Crisis of justice* merujuk pada kondisi kesenjangan antar kelompok sosial serta antar negara (Cock, 2007). Cock menunjuk bahwa tingkat kemiskinan masyarakat makin bertambah di tengah makin cepatnya upaya mendorong kesejahteraan ekonomi dibandingkan masa sebelumnya. Ini terjadi karena akses dan kontrol sumber daya alam tidak terdistribusi merata.

Konsep dasar pembangunan berkelanjutan memang telah menyebutkan perlunya keberlanjutan lingkungan dalam konteks keadilan global. Namun konsep ini mengabaikan, atau mengaburkan, kenyataan ketimpangan relasi kuasa antar negara dan kelompok sosial. Akibatnya pendefinisian lebih lanjut tentang 'pembangunan' dan 'keberlanjutan' cenderung didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian menghasilkan ketidakadilan baru.

Pendekatan *crisis of justice* mencoba menekankan bahwa sumber krisis ekologis justru terletak pada soal ketidakadilan. Kegagalan meletakkan manusia sebagai kunci dalam proses ekologis dianggap telah menghasilkan masalah lingkungan yang

akut. Karena itu, pembangunan berkelanjutan harus ditempatkan dalam kebutuhan untuk menjawab masalah keadilan sosial

Dua kutub perbincangan ini, krisis alam dan krisis keadilan, pada gilirannya menghasilkan berbagai varian wacana. Wacana yang ada membedakan diri dengan yang lainnya dengan mendefinisikan alam dan manusia serta hubungannya dalam derajat yang berbeda-beda. Wacana-wacana tersebut pada dasarnya mencoba menghasilkan batas-batas baru hubungan alam dan manusia melalui perdebatan dan kritik sosial tentang 'lingkungan', 'pembangunan' dan 'keberlanjutan'.

### **Menggali Wacana Lingkungan dan Pembangunan: Kerangka Analisis**

Bagaimana cara kita memahami ragam wacana tentang 'lingkungan', 'pembangunan' dan 'berkelanjutan'? Dalam pendekatan pos strukturalis, wacana dan perbincangan tidak sekedar diletakkan sebagai isu linguistik. Keduanya dianggap sebagai isu sosial karena kemampuannya memproduksi realitas sosial. Bahasa dan perbincangan tentang lingkungan bukan cuma cerminan atas realitas lingkungan tapi juga pembentuk realitas lingkungan (constitutive) (Escobar, 2002). Wacana memungkinkan cerita-cerita disampaikan, termasuk masalah lingkungan apa yang dihadapi manusia serta solusi apa yang bisa diajukan (Dryzek, 1997). Untuk menggali aspek relasional alam dan manusia dalam perbincangan tentang lingkungan dan pembangunan diperlukan kerangka analisis wacana yang holistik.

Karya Dryzek (1997) menawarkan kerangka untuk menganalisa wacana lingkungan. Menurutnya, proses penggalian ini memerlukan identifikasi terhadap beberapa elemen. Identifikasi ini akan membantu menemukan bagaimana diskursus tersebut menempatkan

lingkungan dan manusia serta bagaimana ia membentuk cerita tentang lingkungan (lihat Dryzek, 1997). Pertama, kita perlu melihat ontologi wacana. Ini terkait dengan bagaimana 'eksistensi' dibentuk. Contohnya: apa yang dipahami sebagai lingkungan, alam, ekosistem, manusia, ekologi? Bagaimana hal-hal tersebut didefinisikan? Apakah manusia dan alam dilihat sebagai dua hal yang terpisah? dll. Kedua, mengidentifikasi asumsi tentang hubungan-hubungan dalam alam kita. Beberapa melihat hubungan-hubungan antar manusia dan makhluk hidup dalam kompetisi model pasar dan model Darwinian. Beberapa melihat sistem alam dan sistem sosial saling terkait dan mutual. Beberapa yang lain melihat hubungan dalam alam sebagai dalam tata hubungan yang hierarkis. Ada juga yang melihatnya sebagai kerjasama. Ketiga, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat beserta motivasi dan kepentingannya. Keempat, mengidentifikasi retorika dan metafora-metafora yang digunakan dalam membenarkan kepentingan dan pilihan tindakan lingkungan para aktor.

Dalam studi yang berbeda Anja Nygren (1998a), mengambil kasus Costa Rica, memberikan kerangka analisis untuk melihat wacana lingkungan. Bagi dia tiga hal pokok harus dilacak: faktor pendorong, tujuan dan strategi. Dari kerangka analisis ini Nygren menemukan empat varian dominan dalam wacana lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di negara Dunia Ketiga.

Pertama, environmentalisme untuk alam. Dalam wacana ini fokus terpenting dalam pembangunan berkelanjutan adalah melestarikan lingkungan. Ini bisa dilakukan dengan melindungi alam serta mengkonservasi alam liar dan keanekaragaman hayati. Manusia dianggap berada di luar ekosistem. Krisis lingkungan terjadi sebagai hasil dari tindakan destruktif manusia

terhadap alam. Para penganut diskursus ini selalu mendorong tentang pentingnya tatanan ekologis, dengan sedikit perhatian pada tatanan ekonomi dan sosial.

Kedua, environmentalisme untuk profit. Menurut wacana ini pembangunan berkelanjutan tidak akan berjalan tanpa pertumbuhan ekonomi. Lingkungan harus diberdayakan secara ekonomi. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai revitalisasi ekonomi dimana pelaku bisnis bisa didorong untuk berinvestasi dalam eco-tourism, bio-bussiness, ekstraksi hutan. Ini ditujukan agar alam dan keanekaragaman hayati menjadi komoditas yang menguntungkan dan memiliki nilai jual.

Ketiga, environmentalisme alternatif. Wacana ini melihat bahwa kerusakan lingkungan Dunia Ketiga terjadi karena ekspansi kebudayaan modern Barat dalam praktek kebudayaan masyarakat Non Barat. Tindakan manusia yang agresif terhadap alam lahir dari modernisasi. Barat dan non Barat dikonstruksikan secara homogen dan statis: Barat yang eksploitatif, destruktif dan tak ramah lingkungan, non Barat yang harmonis dengan alam, bijak dan ramah lingkungan. Model pengelolaan sumber daya alam tradisional yang harmonis terhadap alam adalah jawaban bagi problema lingkungan dan pembangunan.

Keempat, environmentalisme untuk rakyat. Wacana ini setuju bahwa sistem produksi yang tidak berkelanjutan merupakan hasil dari degenerasi kebudayaan yang diciptakan oleh modernitas yang berlebihan. Pembangunan berkelanjutan hanya akan terjadi apabila para agen pembangunan memahami ragam macam rasionalitas dalam masyarakat. Pengetahuan lingkungan lokal dianggap akan bisa digunakan sebagai 'esensi vital' untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik dan berbasis manusia. Kunci pokok dalam pengelolaan lingkungan dan

sumber daya alam berkelanjutan adalah adanya partisipasi rakyat dalam setiap proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Alam harus dikelola untuk memberikan keuntungan bagi rakyat.

Dengan mengkombinasikan kerangka analisis yang dipakai Dryzek dan Nygren, bagian selanjutnya memaparkan secara empirik bagaimana dinamika wacana lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di antara berbagai LSM di Indonesia. Basis data yang digunakan adalah wawancara dengan 27 LSM yang bergerak dalam isu-isu lingkungan dalam rentang Juli 2009-Juni 2011. Organisasi-organisasi tersebut berbasis di Lampung, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jakarta. Studi juga dilakukan dengan melakukan analisis isi secara kualitatif terhadap *website* berbagai

LSM lingkungan hidup serta berita-berita media massa terkait dengan aktivitas organisasi yang bersangkutan.

### Variasi Wacana dalam LSM Lingkungan di Indonesia

Sejak kemunculannya di era 1970an, sebagai respon atas kebijakan pembangunan Orde Baru, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia telah menjadi pelopor dalam melahirkan wacana-wacana alternatif hubungan manusia dan lingkungan. Data empirik menemukan bahwa LSM di Indonesia yang bergerak dalam isu-isu lingkungan tidak berada dalam alur wacana tunggal. Fragmentasi wacana lingkungan terjadi sangat kuat dan dipengaruhi relasi organisasi-organisasi tersebut dengan kekuatan global melalui skema kerjasama program dan pembiayaan maupun jejaring pengetahuan.

#### Wacana Dominan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Dunia Ketiga

|                                       | Ontologi                                  | Dorongan  | Asumsi hubungan alam dan manusia                      | Tujuan                          | Strategi                | Aktor Utama                                   | Retorika  |
|---------------------------------------|---|-----------|---|---------------------------------|-------------------------|---|---|
| <b>Environmentalisme untuk alam</b>   | Alam sebagai ibu kehidupan                | Ekologis  | Subordinasi manusia terhadap alam                     | Menjaga dan merawat alam        | Otoritas intervensionis | Lembaga-lembaga konservasi, negara.           | Habitat alam liar; Keanekaragaman hayati; Kepunahan; Konservasi; Melindungi alam dari tangan manusia; Hutan perawan; Mother earth; dll            |
| <b>Environmentalisme untuk profit</b> | Alam sebagai komoditas                    | Ekonomis  | Kompetisi manusia atas sumber daya alam               | Kapitalisasi alam               | Globalisasi neoliberal  | Perusahaan, negara                            | <i>Investing forest</i> ; Produktivitas; Pertumbuhan ekonomi; Komoditas; Perdagangan karbon; <i>Climate investment</i> ; <i>Eco tourism</i> ; dll |
| <b>Environmentalisme alternatif</b>   | Alam dan manusia sebagai kesatuan harmoni | Spiritual | Mutualisme sistem alam dan sistem sosial              | Pembebasan dari Westernisasi    | Populisme radikal       | Masyarakat lokal                              | Harmoni; Nilai lokal; Kearifan; Kembali ke tradisi; Ancaman modernisasi; dll  |
| <b>Environmentalisme untuk rakyat</b> | Alam sebagai sumber kehidupan             | Humanis   | Kerjasama dan keterlibatan aktif untuk mengelola alam | Pembangunan yang sensitif lokal | Partisipasi akar rumput | Masyarakat lokal, organisasi masyarakat sipil | Partisipasi; Pengetahuan lokal; Community-based forest management; dll  |

Sumber: Dimodifikasi dari Nygren (1998) dan Dryzek (1997)



a. *Environmentalisme untuk alam*

Dalam dua dekade terakhir semangat konservasi yang mendasari wacana environmentalisme untuk alam di Indonesia semakin menguat. Ini ditandai dengan makin banyaknya LSM konservasi yang mendorong gagasan perluasan kawasan konservasi. Mereka menganggap bahwa intervensi manusia terhadap alam telah menghasilkan kerusakan serius yang berimplikasi pada kepunahan satwa liar, keanekaragaman hayati, serta sumber daya alam lainnya. Kelompok LSM ini umumnya memiliki kaitan dan jaringan pembiayaan yang kuat dengan organisasi-organisasi internasional maupun individu-individu di negara maju yang memiliki imajinasi tentang hutan tropis yang lebat, binatang liar dan biodiversitas yang terjaga.

Organisasi-organisasi ini menganggap bahwa alam adalah ibu kehidupan. Apabila keberlangsungan hidup manusia ingin dijaga maka intervensi manusia yang merusak alam harus dibatasi. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai perlindungan yang kuat terhadap alam. Posisi ini misalnya ditegaskan oleh aktivis Center for Orang Utan Protection di Jakarta:

“Kami memiliki pilihan strategi berbeda dengan organisasi lingkungan hidup lain. Kami menganggap diri sebagai eco-fascist. Dalam pandangan kami hutan harus dilindungi semaksimal mungkin dari eksploitasi manusia. Tujuan pokoknya adalah melindungi hutan dan isinya. Lalu mengapa kami berkampanye tentang orang utan? Orang utan kami jadikan sebagai titik masuk karena kami anggap lebih bisa menarik perhatian publik ketimbang berbicara hutan sebagai isu umum.”  
(Wawancara dengan Hardi, 27 Agustus 2009).

Hal serupa juga dikemukakan seorang aktivis World Wild Fund (WWF) Lampung (Wawancara 11 Juni 2011). Ia menggambarkan bahwa problema lingkungan dianggap bersumber pada manusia. Kasus antara konflik manusia dengan gajah,

misalnya, dijelaskan dengan dengan argumen bahwa manusia telah masuk dan merusak habitat gajah. Menurutnya, konflik terjadi karena selama sekian lama gajah yang telah memiliki habitat dan jalurnya sendiri terganggu dengan manusia yang membangun kebun dan rumah dimana gajah itu biasanya melintas. Ini ditambah perusakan hutan yang menjadi tempat gajah mencari makan.

Organisasi-organisasi yang menggerakkan wacana ini melihat dua solusi terpenting dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama, menyadarkan masyarakat lewat pendidikan agar tidak merusak alam. Kedua, melalui pengembangan program konservasi yang memisahkan atau membentengi alam dari aktivitas manusia misalnya lewat kawasan konservasi atau taman nasional. Dua hal ini misalnya menjadi agenda penting WWF Kalimantan Tengah yang terlibat aktif mendorong pengembangan Taman Nasional Sebangau.

Organisasi-organisasi ini sering menggunakan retorika ‘habitat alam liar’, ‘keanekaragaman hayati’, ‘kepunahan’, ‘konservasi’, ‘melindungi alam dari tangan manusia’, ‘hutan perawan’, dll. Dalam berbagai sosialisasi ke publik tentang aktivitasnya (misal lewat media massa ataupun leaflet) mereka membawa gambaran tentang romantisme satwa liar, hutan yang hijau, langit dan laut yang biru, serta ancaman-ancamannya dll. Tatanan ekologis dianggap lebih penting dari soal ekonomi atau sosial. Dalam sebuah berita, seorang aktivis mengkritisi kebijakan status kawasan dalam peta kehutanan dengan retorika tersebut:

“Salah satu hal yang harus diperbaiki dalam kebijakan hutan adalah status kawasan dalam peta kehutanan. Banyak terjadi ketidaksesuaian antara status dalam dokumen dan kenyataan. Salah satunya di desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga. Dokumennya tertulis lahan kritis. Padahal

sebenarnya habitat bagi 11 mamalia, 34 jenis burung dan tanaman obat." (Kompas, 6 Desember 2011. Cetak miring penulis)

LSM yang mendorong wacana ini mendapatkan dukungan kuat dari organisasi-organisasi konservasi internasional dan bahkan secara langsung menjadi jaringan lokal dari organisasi tersebut. Selain itu dukungan finansial dari individu maupun kelompok masyarakat di negara maju melalui *charity* juga dilakukan. Ini misalnya dinyatakan oleh aktivis COP bahwa proses *charity* untuk lembaganya ke depan akan dimaksimalkan dengan membuat kampanye yang ditujukan kepada komunitas penyayang binatang di Eropa yang memiliki basis dana kuat. Selama ini telah banyak individu-individu di negara maju yang menyumbang untuk perlindungan orang utan.

Wacana yang dikembangkan LSM yang berbasis pada environmentalisme untuk alam ini dikritik karena dianggap tidak terlalu memberi perhatian pada dimensi manusia dan meletakkan manusia sebagai hal yang eksternal dari ekosistem. Orang lokal yang bergantung kehidupannya pada alam dianggap sebagai '*invisible people*' dan mengabaikan hak dan klaim mereka atas sumberdaya alam di kawasan lindung tersebut (Haenn, 1999; Nygren, 1998a). Wacana ini juga dikritik karena dipengaruhi oleh model pengelolaan lingkungan Barat yang konservasionistik dalam konteks hubungan alam dan manusia di Indonesia yang berbeda dimana banyak kelompok masyarakat bergantung kehidupannya pada hutan.

#### b. *Environmentalisme untuk profit*

Dalam usaha perlindungan hutan di Indonesia berkembang juga wacana yang melihat bahwa hutan tidak sekedar memiliki nilai ekologis. Hutan hanya akan memiliki makna luas bagi manusia apabila bisa dikelola secara ekonomis. Lembaga-

lembaga ini tidak menampik bahwa perlindungan atau bahkan konservasi hutan diperlukan. Namun, mereka menganggap bahwa hal paling penting adalah implikasi produksi yang didapatkan dari proses tersebut. Pembangunan berkelanjutan lebih banyak diletakkan pada pertanyaan: keuntungan ekonomi apa yang bisa didapatkan melalui upaya perlindungan hutan?

Dalam wawancara peneliti dengan sebuah LSM di Lampung tergambar bagaimana perlunya upaya perlindungan alam dan hutan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan mendorong tumbuhnya *eco tourism*. Seorang pengelola Yayasan Sahabat Alam yang bergerak dalam konservasi kupu-kupu menyatakan:

"Area hutan kami jaga agar kupu-kupu bisa berkembang di taman yang kami bikin. Ini karena untuk menjadi kupu-kupu diperlukan habitat berkembang biak dan mencari makanan yang cukup. Kami berharap tempat ini akan menjadi tempat wisata yang menarik. Dengan begitu tidak hanya hutan yang terjaga tapi kita juga menghasilkan sesuatu." (Wawancara Ketua Pengelola YSA, 13 Juni 2011).

Organisasi yang menggunakan wacana ini sering juga memperbincangkan peran investasi terhadap alam. Ini misalnya dilakukan oleh Yayasan Kelestarian alam Yogyakarta yang mendorong *eco tourism* dan pengembangan usaha *outbond*. Selain itu investasi atas alam juga dipercaya akan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Seorang anggota LSM lain yang berbasis di Sumatra menegaskan:

"Kekayaan hutan kita kan bukan cuma pada kayunya. Di dalam hutan banyak produk-produk non kayu yang bisa dijadikan komoditas. Kita perlu mempertimbangkan hal ini agar investor bisa datang dan membantu pembangunan ekonomi masyarakat" (Wawancara dengan LSM M, 11 Juni 2011)

Komodifikasi hutan bukan hanya bisa dilakukan melalui proses ekstraksi dan eksploitasi. Dalam kasus-kasus terbaru proses ini dapat diwujudkan melalui investasi pada kawasan konservasi tertentu. Ini bisa dilihat dari kasus REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) dimana sejumlah LSM nasional dan internasional memberikan dukungannya terhadap skema investasi perdagangan karbon. Di Jambi eks HPH PT Asialog telah dijadikan area REDD Readiness yang konsesinya diberikan oleh Departemen Kehutanan kepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI). Perusahaan ini didirikan oleh konsorsium beberapa LSM konservasi internasional dan nasional (Royal Society for the Protection of Birds, Burung Indonesia, Birdlife Internasional).

Wacana environmentalisme untuk profit ini merupakan sejalan dengan wacana Bank Dunia dan lembaga pembangunan internasional. Bahkan Bank Dunia mendorong program-program terkait dengan investasi sektor kehutanan melalui berbagai skema kerjasama internasional. Investor didorong untuk masuk ke dalam sektor kehutanan dan lembaga masyarakat sipil difasilitasi untuk membuka kondisi yang memungkinkan investasi bekerja misalnya lewat program penyadaran hukum, kewirausahaan, dll. Retorika yang sering muncul dalam wacana ini misalnya 'investing forest', 'produktivitas', 'pertumbuhan ekonomi', 'komoditas', 'perdagangan karbon', 'climate investment', 'eco tourism', dll.

Wacana ini memang memiliki perhatian terhadap masyarakat sekitar hutan untuk berdaya secara ekonomi. Karena itu beberapa LSM, misalnya LSM M, memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk bisa menghasilkan produk-produk yang terkait dengan sumber daya hutan secara lebih maksimal. Atau lebih tepatnya mereka melakukan pelatihan dan

pendampingan agar masyarakat sekitar hutan bisa mengadaptasi praktek-praktek ekonomi pasar dengan melakukan modernisasi produk dan proses ekonomi lokal. Di beberapa tempat di Sumatra ada juga LSM yang mendorong pelatihan perhitungan karbon kepada masyarakat agar bisa terlibat aktif dalam perdagangan karbon REDD.

Wacana ini dikritik karena menempatkan dimensi ekonomi sebagai unsur pokok. Padahal dalam konteks Indonesia hutan telah berperan besar dalam pembentukan dinamika sosial-budaya lokal serta bagian penting dalam sistem ekologis. Modernisasi ekonomi dan liberalisasi ekonomi dalam pengelolaan hutan juga berpotensi menghasilkan oligarki ekonomi dimana penguasa modal besar akan menentukan arah komodifikasi hutan dengan korban masyarakat lokal (lihat Nygren, 1998a). Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam proses ini. Namun pertanyaannya bukan soal ada tidaknya keuntungan ekonomi yang didapat, tapi keuntungan untuk siapa? Siapa yang mendapat keuntungan lebih besar?

### c. *Environmentalisme alternatif*

Narasi tentang ancaman kebudayaan modern telah menjadi unsur penting dalam praktek perlindungan hutan oleh beberapa LSM. Wacana environmentalisme alternatif ini melihat hutan dan masyarakat lokal sebagai kesatuan harmonis. Masyarakat dianggap mewarisi kearifan lokal secara turun temurun. Pengetahuan masyarakat lokal atas alam telah menjadikan mereka bertahan hidup ratusan tahun serta mampu menjadikan alam sebagai sumber kehidupan. Masyarakat lokal adalah penjaga hutan sejati yang menggunakan hutan secara bijak untuk kayu bakar, berburu, spiritualitas, mendapatkan obat-obatan, dll.

Kehadiran kebudayaan modern yang eksploitatif dianggap sebagai ancaman terbesar kelestarian hutan dan masyarakat lokal. Praktek manajemen kehutanan modern dianggap selalu bersifat merusak. Praktek tersebut menandai dominasi manusia modern terhadap lingkungan yang berakibat pada runtuhnya harmoni alam dan manusia.

Ancaman terhadap harmoni ini bisa dilihat dalam sebuah pernyataan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengenai REDD+ dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa:

“Masyarakat adat merupakan pemegang hak atas wilayah dan hutan adat. Masyarakat adat memiliki berbagai kearifan lokal yang selama ratusan tahun telah terbukti berhasil menjaga, mengelola dan mempertahankan hutan secara arif dan lestari. Proyek-proyek pembangunan melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit, tambang, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pengembangan Lahan Gambut (PLG), merupakan penyebab utama kerusakan dan hilangnya hutan di Kalimantan Tengah.”. (AMAN, 17 Juni 2011)

Soal ini juga secara eksplisit muncul dalam wawancara dengan tiga aktivis KKI WARSIS (Wawancara, 11 Mei 2011) di Jambi. Menurut mereka modernisasi telah menjadikan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan terancam. Dalam kasus Suku Anak Dalam (Orang Rimba) beberapa aktivis menyebut bahwa mereka secara tradisional adalah masyarakat yang ramah terhadap alam. Mereka tidak pernah merusak hutan karena percaya akan membawa pengaruh buruk untuk kehidupan masyarakat lokal. Kalaupun mereka memanfaatkan sumber daya di hutan maka perhitungan terhadap kelestariannya dijadikan sebagai aturan dasar. Tidak boleh mengambil berlebihan. Namun, menurut aktivis tersebut, sekarang

banyak dari mereka yang terpengaruh budaya kota dan semakin konsumtif. Ini diperparah dengan banyaknya alih fungsi hutan yang membuat ruang hidup Orang Rimba semakin menyempit.

Kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola hutan secara lestari dipandang menjadi jawaban atas masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktek-praktek modern. Pembangunan berkelanjutan hanya dimungkinkan kalau kearifan lokal dihadirkan sebagai kunci pengelolaan hutan. Para aktivis melihat hal ini masih mungkin dilakukan karena kearifan lokal, meskipun sudah semakin surut, masih hidup dan bertahan dalam keseharian masyarakat lokal. Intinya, pembangunan harus ‘dilokalkan’.

Dalam wawancara dengan JB, seorang aktivis LSM pemberdayaan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, misalnya mengatakan bahwa salah satu program di lembaganya diarahkan untuk mendorong agar pemerintah dan masyarakat merawat praktek-praktek kebudayaan lokal yang arif terhadap hutan dan alam. Masalah yang selama ini melahirkan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat Dayak di sekitar hutan, menurutnya, ada pada kegagalan negara dalam menghargai tradisi masyarakat Dayak dalam kebijakan pembangunan yang terkait dengan kehutanan.

Wacana environmentalisme alternatif yang dikumandangkan aktivis LSM biasanya ditandai dengan beberapa jargon khas: ‘harmoni’, ‘nilai lokal’, ‘kearifan’, ‘tradisi’, ‘ancaman modernisasi’, dll. Aktor penting dalam pembangunan berkelanjutan terletak pada masyarakat lokal. Wacana ini juga diwarnai dengan kecenderungan untuk menghadapkan antara lokal-non lokal, tradisi-modernitas, harmoni-eksploitasi.

Meskipun memiliki keberpihakan pada kelompok marjinal namun wacana ini juga dikritik. Pertama, mengasumsikan bahwa

tradisi dan kearifan lokal sebagai sesuatu yang otentik tanpa melihat peran dari persentuhan dengan tradisi luar (termasuk Barat) yang selama sekian lama berkontribusi membentuk 'tradisi lokal'. Kedua, sebagai akibat dari hal tersebut, pengetahuan dan praktek-praktek lingkungan masyarakat lokal dianggap statis, tidak berubah. Ketiga, masyarakat lokal dalam banyak kasus juga bisa menjadi bagian dari pelaku yang terlibat dalam destruksi hutan yang menjadi sumber kehidupan terpenting masyarakat lokal. Misalnya, *illegal logging* maupun pembakaran hutan yang tak terkontrol (Tsing, 2005).

d. *Environmentalisme untuk rakyat*

Model pembangunan klasik yang menempatkan masyarakat sebagai objek statis telah menghasilkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang akut. Gagasan yang dimunculkan environmentalisme alternatif memang mencoba keluar dari masalah tersebut dengan menempatkan kearifan lokal sebagai pilar pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Meski begitu, banyak aktivis yang kemudian menyadari bahwa kembali sepenuhnya ke otentisitas nilai lokal sebagai satu-satunya jalan menuju pembangunan yang berkelanjutan menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan, kalau tidak dikatakan mustahil. Menurut mereka pengelolaan sumber daya alam perlu juga mengadaptasi perkembangan jaman.

Menurut berbagai aktivis yang diwawancarai peneliti (misalnya KPSHK Bogor, Walhi, Pokker SHK Palangkaraya, Javlec Jogja, JKPP Bogor, dll) pengetahuan lokal harus diintegrasikan ke dalam program pembangunan dan pengelolaan sumber daya hutan. Menurut mereka proses ini bisa dilakukan dengan mengembangkan partisipasi masyarakat lokal dalam program pengelolaan hutan. Aktivis-aktivis seringkali menggunakan retorika 'partisipasi',

'pengetahuan lokal', '*community-based forest management*', dll. Mereka meyakini bahwa kunci pembangunan kehutanan berkelanjutan terletak pada pemahaman empatik terhadap pengetahuan masyarakat lokal. Muncul kesan yang kuat bahwa pembangunan berkelanjutan terjadi apabila negara memahami ragam macam rasionalitas masyarakat lokal dan menggunakan cara pandang mereka untuk mempromosikan lingkungannya (lihat argumen Nygren, 1998a). Dengan cara demikian maka modernisasi sosial dan pengelolaan hutan akan mengakar dalam kebudayaan masyarakat.

Dari wawancara ditemukan juga bahwa LSM yang berada dalam lingkup wacana ini menganggap perlunya kerangka kerja transformatif. Masyarakat lokal harus didorong untuk memahami masalah yang mereka hadapi sekaligus menjadi pelaku untuk keluar dari persoalan tersebut. Mereka meyakini perlunya upaya untuk mengembangkan model advokasi lingkungan yang mampu menggugah kesadaran kritis masyarakat lokal.

Proses ini misalnya dilakukan oleh sebuah LSM di Kalimantan Tengah yang mengembangkan program pemetaan partisipatif. Melalui upaya ini masyarakat diharapkan sadar tentang hutan sebagai ruang hidup mereka. Masyarakat dilatih untuk mengidentifikasi alam, sumber daya serta batas-batas pengelolaannya dengan mendasarkan diri pada sejarah dan pengetahuan yang selama ini hidup dalam praktek sosial mereka. Seorang aktivis Pokker SHK Palangkaraya menyatakan:

"Kita memfasilitasi masyarakat untuk memiliki kesadaran atas ruang hidupnya. Pemetaan hutan partisipatif bisa memberi senjata buat masyarakat menghadapi perubahan. Dalam proses pemetaan penghargaan terhadap tradisi, sejarah ataupun pengetahuan masyarakat dalam memahami hutan harus kita tempatkan sebagai hal paling penting dalam advokasi.

Soal mereka mau *ngapain* setelah itu hak mereka. Biarkan masyarakat yang menentukan sendiri bagaimana peta itu dibuat dan digunakan. Buat kami yang penting mereka menyadari segala konsekuensi yang mereka lakukan.” (Wawancara dengan, Uban, 20 April 2011).

Keyakinan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat juga telah mendorong aktivis mempromosikan Community Based Forest Management (CBFM). Aktivis-aktivis di Jogjakarta yang bergerak dalam isu-isu ini (misal Arupa, Javlec) menyatakan bahwa manajemen hutan berbasis masyarakat bisa menjadi model pengelolaan hutan berkelanjutan dan meminimalisasi resiko konflik sumber daya hutan. Dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan maka keberlanjutan bisa lebih dijamin karena tumbuhnya rasa memiliki masyarakat terhadap hutan yang menjadi tempat sandaran ekonomi mereka.

Meski memiliki peluang mendorong pengelolaan sumber daya yang transformatif namun wacana ini dikritik karena terjebak dalam narasi dominan yang lembaga-lembaga pembangunan yang berorientasi profit. Contohnya, konsep tentang partisipasi didorong kuat Bank Dunia sebagai strategi baru integrasi sumber daya lokal ke pasar global (Turnbull, 2009). Selain itu kritik juga muncul karena gagasan para aktivis tentang kesadaran transformatif dianggap belum bisa keluar dari rejim kuasa pengetahuan dominan. Akibatnya partisipasi masyarakat hanya berkutat pada ruang kecil pengambilan keputusan sementara ruang besar lainnya berada di luar kontrol mereka (Nygren, 1998a).

### **Meredefinisi Akses, Kontrol dan Pemanfaatan Alam: Catatan Penutup**

Perbedaan perspektif dalam melihat lingkungan dan pembangunan tidak bisa dipahami sebagai kegagalan organisasi masyarakat sipil Indonesia menyatukan

persepsi pembangunan berkelanjutan. Wacana-wacana tersebut dalam prakteknya tidak bisa secara tegas dipilahkan karena satu LSM seringkali menggunakan elemen dari wacana lain dalam strategi dan program-programnya. Sebagai contoh, kini banyak LSM yang berada dalam jalur environmentalisme untuk alam mulai mengadaptasi partisipasi masyarakat lokal dalam program-program konservasi. Ini misalnya dilakukan oleh WWF, COP. Di sisi yang lain kini tidak sulit menemukan environmentalis alternatif yang terlibat dalam program partisipasi dan konservasi. Ini contohnya dilakukan oleh organisasi-organisasi di bawah Yayasan Pancur Kasih Kalimantan Barat. Perbedaan tersebut justru telah memberi dorongan baru bagi munculnya dialog dalam menemukan masalah dan solusi yang disesuaikan dengan perubahan konteks.

Dari studi empirik yang ada para aktivis LSM tidak jarang melakukan aliansi taktis maupun strategis dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki arus wacana berbeda. Kasus-kasus lingkungan yang terjadi di beberapa daerah seringkali direspon bersama sekompok LSM dimana masing-masing elemen menggunakan argumen-argumen yang berbeda untuk satu tujuan yang sama. Misalnya, dalam kasus penolakan perluasan perkebunan sawit di Kalimantan ada LSM (Misal COP, WWF yang menggunakan argumen konservasionis dengan mengatakan bahwa perluasan tersebut akan mengancam habitat satwa liar. Ada juga LSM, misalnya Yayasan Betang, yang menolak karena profit ekonomi yang dihasilkan tidak akan berkontribusi banyak bagi daerah. Sementara yang lain mengatakan bahwa praktek perkebunan akan mengancam praktek-praktek lingkungan masyarakat lokal yang sudah mengakar selama ratusan tahun. Ini misalnya disampaikan aktivis Save Our Borneo dan Pokker SHK. Adanya

adaptasi elemen-elemen wacana lain dalam aktivisme LSM menunjukkan adanya negosiasi untuk menemukan batas-batas baru hubungan alam dan manusia

Berangkat dari hal ini maka kerangka analisis Nygren dan Dryzek harus dilihat sebagai cara untuk menghasilkan peta makro. Apabila kategori ini diterapkan secara kaku maka bisa beresiko pada penyederhanaan realitas empirik tentang wacana lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di kalangan LSM di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan studi lanjut tentang proses kontestasi maupun hibridisasi wacana di kalangan LSM Indonesia yang lebih mendalam. Produksi dan reproduksi wacana adalah proses yang terjadi secara kontinyu untuk mendefinisikan lingkungan dan pembangunan.

Studi ini menegaskan ulang bahwa kategori dikotomis dalam melihat masalah lingkungan tidak lagi relevan. Masalah dan solusi lingkungan dan pembangunan tidak terletak pada soal 'alam' atau 'manusia', ataupun pada soal 'krisis ekologis' atau 'krisis keadilan'. Namun jauh lebih penting adalah memperdebatkan secara luas aspek relasi di antara keduanya (Brockington & Igoe, 2008). Wacana tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah tentang akses, kontrol, pemanfaatan alam oleh manusia serta implikasi-implikasinya. Strategi dan kuasa pengetahuan menjadi energi penting untuk menghindari dominasi cara berpikir sehingga memungkinkan kita memperdebatkan secara terus menerus tentang: apa yang akan diberlanjutkan? Berlanjut untuk siapa? Berlanjut oleh siapa?

Kajian ini juga menegaskan argumen Dryzek bahwa wacana memang digdaya, namun tidak selamanya menentukan (Dryzek, 1997). Dia mengkritik Foucault dan pengikutnya yang menganggap wacana dominan dianggap selalu hegemonik. Artinya satu wacana diasumsikan selalu

dominan kapanpun dan dimanapun serta mengkondisikan persetujuan tentang hal-hal tertentu maupun kerangka aturan untuk memperdebatkannya. Wacana pembangunan berkelanjutan yang dianggap dominan dalam prakteknya terbukti mengalami penafsiran dan penerjemahan ulang. Karena itu strategi pengetahuan menjadi kunci penting bagi kelompok-kelompok sosial untuk bisa keluar dari dominasi yang ada. Dengan cara semacam ini maka karakter transformatif wacana bisa dipakai sebagai energi penting dalam perubahan sosial.

### Daftar Pustaka

- AMAN. (17 Juni 2011). *Pernyataan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengenai REDD+ dan Rencana Tata Ruang Wilayah* Provins. Palangkaraya.
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). *Land degradation and society*. London: Methuen.
- Brockington, D., & Igoe, J. (2008). *Eviction for conservation. A global overview*. *Current Conservation*, 2 (3).
- Bryant, R. L. (1998). Power, knowledge and political ecology in the Third World: a review. *Progress in Physical Geography*. Volume 22. pp. 1.
- Castree, N., & Braun, B. (2001). *The construction of nature and the nature of construction. Analytical and political tools for building survivable futures Social nature. Theory, practice and politics*. Massachusetts-Oxford: Blackwell Publisher.
- Cock, J. (2007). Sustainable development or environmental justice. Questions for the South African labour movement from the Steel Valley struggle. *Labour and Capital*. Volume 40 (1&2).

- Dryzek, J. S. (1997). *The politics of the earth: environmental discourses*. Oxford University Press.
- Escobar, A. (1995). *Encountering development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton.
- Escobar, A. (2002). *Constructing nature. elements for a post-structural political ecology*. In R. Peets & M. Watts (Eds.), *Liberation ecologies. Environment, development and social movements*. London and New York: Routledge.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge. Selected interviews and other writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books.
- Goldman, M. (2005). *Imperial nature. The World Bank and struggles for social justice in the age of globalization*. New Haven and London: Yale University Press.
- Haenn, N. (1999). The power of environmental knowledge: ethnoecology and environmental conflicts in Mexican conservation. *Human Ecology*. Volume 27. Issue 3.
- Hajer, M. A. (1995). *The politics of environmental discourse, ecological modernization and the policy process*. New York: Oxford University Press.
- Kompas. (6 Desember 2011). Status kawasan hutan harus ditinjau ulang. *Kompas*.
- Luke, T. (1999). *Environmentality as green governmentality Discourses of the environment*. Massachusetts: Blackwell.
- Mebratu, D. (1998). Sustainability and sustainable development. Historical and conceptual review. *Assessment Review*. Volume 18. Issue 6.
- Mueller, T., & Passadakis, A. (2009). Green capitalism and the climate: It's economic growth, stupid! *Critical Currents*. Volume 54. Issue 6.
- Nygren, A. (1998a). Environment as discourse: searching for sustainable development in Costa Rica. *Environmental Values*. Volume 7. pp. 201-222.
- Nygren, A. (1998b). Struggle over meanings: reconstruction of indigenous mythology, cultural identity and social representation. *Ethnohistory*. Volume 45. Issue 1. pp. 31-63.
- Nygren, A. (1999). Local knowledge in the environment–development discourse. From dichotomies to situated knowledges. *Critique of Anthropology*. Volume 19. Issue 3.
- Nygren, A. (2000). Development discourses and peasant–forest relations: natural resource utilization as social process. *Development and Change*. Volume 31. pp. 11-34.
- Roberts, J. (2011). How Western environmental policies are stunting economic growth in developing countries. *Backgrounder* (2509).
- Tsing, A. L. (2005). *Friction. an ethnography of global connection*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Turnbull, D. (2009). Futures for indigenous knowledge. *Futures*. Volume 41.
- Walker, P. (2005). Political ecology: where is the ecology? *Progress in Human Geography*. Volume 29. Issue 1.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press. Oxford.